

**ANALISIS KONTRIBUSI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Ngawi)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

NUR ROHIIM
B. 200 080 190

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KONTRIBUSI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Ngawi)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NUR ROHIIM
B. 200 080 190

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen pembimbing.



Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah naskah publikasi dengan judul:

**ANALISIS KONTRIBUSI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Ngawi)**

Yang ditulis oleh

Nur Rohiim

NIM : B. 200 080 190

Telah dipertahankan di Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta, dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Surakarta, 03 Februari 2018

Dewan penguji :

1. Drs. Suyatmin Waskito Adi Msi

()

2. Drs. Yuli Tri Cahyono, M.M, A.K

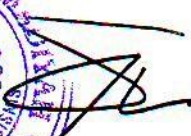
()

3. Drs. Fauzan S.E, Msi

()



Dekan,

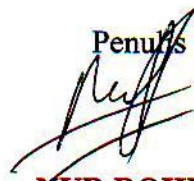

Dr. Syamsyudin, M.M

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Februari 2018

Penulis

NUR ROHIM
B. 200 080 190

**ANALISIS KONTRIBUSI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Ngawi)**

Abstrak

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji dan analisis statistik, dapat disimpulkan: (1) Kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerah selama tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2016 Di Kabupaten Ngawi masih sangat rendah, tingkat pendapatan rata-rata 7,61% dan mengalami pertumbuhan yang lambat sebesar 0,13%. (2) Rasio efektivitas, terlihat bahwa pada tahun anggaran 2014 mencapai 107,26% berarti sudah melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun fiskal 2015, Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Asal mencapai 108,49% dari target yang ditetapkan. Pada tahun fiskal 2016, rasio efektivitas pengumpulan Pendapatan Asli Daerah adalah 125,71%. (3) Rasio efisiensi penerimaan asli Kabupaten Ngawi pada tahun 2014 mencapai 98,4% (1,6%) dan efisiensi rasio 2015 98,7% (1,3%) sedangkan tahun anggaran 2016 adalah 98,54% atau (1,5%). Rasio efisiensi dari tiga tahun fiskal tidak melebihi batas rasio efisiensi yang dapat ditolerir. Pada tahun anggaran 2014-2016, rasio efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Ngawi berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah karena tunggakan tahun ini paling kecil bila dibandingkan dengan tunggakan pada tahun fiskal lainnya.

Kata kunci: *Kontribusi; Efisiensi dan Efektivitas; Pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah.*

Abstract

Based on this analysis, it can be concluded that based on the results of the test and statistical analysis, it can be concluded: (1) The contribution of the original regional income in financing regional development during the fiscal year 2014 to the budget year 2016 in Ngawi Regency is still very low, the average income level 7.61% and experienced a slow growth of 0.13%. (2) Ratio of effectiveness, it is shown that in fiscal year 2014 reaching 107.26% means already exceed the target that has been determined. In fiscal year 2015, the Revenue Effectiveness ratio of the Original Region reaches 108.49% of the target set. In fiscal year 2016, the ratio of effectiveness on the collection of Local Revenue is 125.71%. (3) Ratio efficiency of Ngawi District's original revenue in 2014 reaches 98.4% (1.6%) and 2015 ratio efficiency 98.7% (1.3%) while budget year 2016 is 98.54% or (1.5%). The efficiency ratios of the three fiscal years do not exceed the limits of the tolerable efficiency ratios. In the fiscal year 2014-2016, the effectiveness and efficiency ratios of the Ngawi District Government succeeded in collecting the Local Revenue because this year's arrears are the smallest when compared to the arrears in other fiscal year.

Keywords: Contribution; Efficiency and Effectiveness; Regional Original Revenue and Regional Income.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat berarti desentralisasi dan otonomi daerah, karena mampu mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi masyarakatnya secara baik dan benar. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat akan mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya (Widodo, 2001: 1).

Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Dimensi reformasi keuangan daerah tersebut adalah : (1) perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan; (2) perubahan prinsip pengelolaan anggaran; (3) perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan *deficit spending*; dan (4) perubahan strategi pembiayaan (Yuwono, 2001: 81).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami deficit fiskal.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah kontribusi efisiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Ngawi selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

Sampel penelitian ini meliputi : (1) Realisasi PAD yang prosentase kontribusinya terhadap pendapatan daerah dibagi dengan pendapatan daerah. (2) Efektivitas pendapatan asli daerah diperoleh dari prosentase Realisasi Penerimaan PAD dibagi dengan target pendapatan asli daerah. (3) Efisiensi pendapatan asli daerah diketahui dari Biaya Pemungutan PAD dibagi dengan target PAD dalam bentuk prosentase

Alat analisis yang digunakan untuk melihat analisis pengelolaan pendapatan asli daerah

Cara pengukurannya : 1. Apabila rasio yang diperoleh masih dibawah standar ratio sebesar 5% (Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2006) dari realisasi, maka dapat dikatakan biaya pemungutan PAD efisien. 2. Apabila rasio yang diperoleh melampaui standar rasio sebesar 5% (Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2006) dari realisasi, maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD kurang efisien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

Dari tiap tahun anggaran, pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dominan dalam menyokong bantuan finansial terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Kabupaten Ngawi, atau dapat di katakan bahwa APBD Kabupaten Ngawi secara mutlak berasal dari pemerintah yang lebih tinggi. Kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah masih rendah dan jauh dari harapan. Berarti faktor utama yang menjadi kendala kecilnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi, antara lain : a. Minimnya sumber daya alam yang secara potensial memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Keadaan ini didukung oleh kondisi alam yang tandus dan gersang. b. Hampir 23 % penduduk Kabupaten Ngawi berada di bawah garis kemiskinan yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sektor swasta. c. Banyaknya penduduk usia produktif yang meninggalkan daerah untuk memperbaiki taraf hidup. d. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi cukup tinggi, maka realisasi penerimaan pajak dan retribusi dapat tercapai dari target yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan pajak pada ketiga tahun anggaran yang dijadikan sampel penelitian masih di bawah target yang ditetapkan. Data dari tabel penerimaan menunjukkan pada tahun anggaran 2014 realisasi penerimaan pajak hanya Rp. 33.899.833.398. dari target yang ditetapkan, untuk tahun anggaran 2015 telah terealisasi penerimaan pajak dengan nilai sebesar Rp. 38.537.158.480.

Pada tahun anggaran 2016 terjadi peningkatan realisasi pajak mampu dicapai sebesar Rp.41.867.576.220.

Selanjutnya akan dibahas dan diuraikan secara komprehensif mengenai sektor-sektor yang berpengaruh terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah pada setiap tahun anggaran. a. Pada Tahun Anggaran 2014 Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi naik 4,49 % dari Tingkat Pendapatan Daerah sebelumnya yakni sebesar 104,49 %. Peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah dari anggaran sebelumnya (2014) hanya mampu mencapai nilai sebesar Rp. 169.237.013.272. dan pada tahun anggaran 2015 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan nominal menjadi Rp. 191.166.217.182. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan pada penerimaan pos lain-lain pendapatan yang sah, dan penerimaan pada pos retribusi daerah walaupun kenaikan relatif kecil, meskipun tahun 2014 penerimaan pada pos pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 33.899.833.398. dari Rp. 28.096.000.000. dari target dan tahun 2013 yang nilainya Rp. 16.826.150.653. b. Hasil perhitungan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2014 tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi meningkat 2,44 % dari tahun anggaran sebelumnya (tahun 2013). Pendapatan daerah dalam tahun anggaran tahun (tahun 2015) ini mencapai Rp. 38.537.158.480. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yakni tahun anggaran 2014 peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi mencapai Rp. 191.166.217.182. Proporsi terbesar disumbangkan oleh pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp. 41.867.576.220. Retribusi daerah sebesar Rp. 15.637.879.450. dan pos lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 128.818.797.383.. dan proporsi terendah berasal dari pos pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 9.282.208.785. yang perlu dicatat dari tahun anggaran tahun 2016 ini adalah bahwa format atau pola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi mengalami perubahan namun perubahan tersebut tidak melenceng jauh dari format atau pola yang digunakan sebelumnya.

Pada Tahun anggaran 2014 rasio efisiensi pada pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi mencapai 1,180 % berarti kemampuan

pemerintah daerah dalam merealisasikan efisiensi Pendapatan Asli Daerah mencapai titik maksimal, artinya sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Tahun anggaran 2015, rasio efisiensi terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah mencapai 1,151 %. Pada tahun anggaran 2016, rasio efisiensi pada pemungutan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 1.225 %. Dari total target yang dianggarkan dan realisasi penerimaan sudah melebihi target. Pos Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah tanpa dikenakan biaya pemungutan berpengaruh terhadap kenaikan rasio efisiensi karena realisasi penerimaan dari pos ini ternyata melebihi target yang ditetapkan.

Berdasar data di atas, dapat disimpulkan bahwa pada ketiga tahun anggaran yang dijadikan sample penelitian ini, pemerintah daerah Kabupaten Ngawi telah mencapai tingkat efisiensi dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah karena tunggakan pada tahun ini adalah yang terkecil jika dibandingkan dengan tunggakan pada tahun-tahun anggaran lain.

3.2. Kontribusi Pendapatan Daerah

Kemampuan Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan otonomi daerah, secara objektif tabel di atas menggambarkan dengan jelas bahwa bantuan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sangat dominan. Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi dapat disajikan sebagai berikut :

- 1) Anggaran 2014 PAD diperoleh sebesar Rp. 169.237.013.272. Total penerimaan sebesar Rp. 1.684.599.358.255. Tingkat pendapatan daerah sebesar 10,04 %
- 2) Anggaran 2015 diperoleh PAD sebesar Rp. 191.166.217.182. sedangkan total penerimaan sebesar Rp. 1.912.183.743.923.. Tingkat pendapatan daerah sebesar 9,99 %.
- 3) c. Anggaran 2016 diperoleh PAD sebesar Rp. 195.606.461.846, sedang total penerimaan sebesar Rp. 1.977.837.459.066. Tingkat pendapatan daerah sebesar 9,89 %

Dari tiap tahun anggaran, pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sangat dominan dalam menyokong bantuan finansial terhadap pelaksanaan pembangunan pada Kabupaten Ngawi, atau dapat di katakan bahwa APBD

Kabupaten Ngawi berasal dari pemerintah yang lebih tinggi yakni pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Fakta di kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa dari aspek pendapatan pajak dan retribusi bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi cukup tinggi, maka realisasi penerimaan pajak dan retribusi dapat tercapai dari target yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan pajak pada ketiga tahun anggaran yang dijadikan sampel penelitian masih di atas target yang ditetapkan. Data dari tabel penerimaan menunjukkan pada :

- 1) Anggaran untuk tahun 2014 realisasi dari penerimaan pajak hanya Rp. 33.899.398.- dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 28.096.000.000.,
- 2) Anggaran tahun 2015 adalah terealisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 38.537.158.48., target sebesar Rp. 31.463.272.000.-
- 3) Anggaran pada tahun 2016 terjadi peningkatan dimana realisasi pajak mampu dicapai sebesar Rp.41.867.576.220.-. dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 37.127.000.000.-.

Secara komprehensif sektor-sektor yang berpengaruh terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah pada setiap tahun anggaran, yakni :

- 1) Pada tahun anggaran 2014 tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi sebesar 2,98 %. Artinya Pendapatan Asli Daerah hanya mampu memberikan kontribusi 2,98 % atau Rp. 16.826.150.653.- terhadap realisasi total penerimaan.
- 2) Pada tahun anggaran 2014 ini bagian pos laba usaha daerah tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah adalah lain-lain pendapatan yang sah, kemudian disusul retribusi daerah, dan yang terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 3) Pada tahun Anggaran 2015 tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi naik 11,47 % dari tingkat Pendapatan Daerah sebelumnya. Pada tahun anggaran 2015 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi meningkat menjadi Rp. 191.166.217.182. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan pada penerimaan Lain-lain pendapatan PAD yang sah dan penerimaan pada

pos retribusi daerah walaupun kenaikan relatif kecil, meskipun tahun ini penerimaan pada pos pajak daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 38.537.158.480.- dari target sebesar Rp. 31.463.272.000.-.

- 4) Anggaran pada tahun 2016 tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi dapat meningkat 3,43 % dari tahun anggaran sebelumnya (tahun 2015). Pendapatan asli daerah dalam tahun anggaran ini (tahun 2016) mencapai Rp. 195.606.461.846.-. Proporsi terbesar disumbangkan oleh pos dari pajak daerah sebesar Rp. 41.602.319.867.- dari target sebesar Rp. 37.127.000.000.-. Sedangkan retribusi daerah diperoleh sebesar Rp. 15.637.879.458.- dan pos lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 128.818.797.383.-. Proporsi terendah berasal dari pos pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yakni sebesar Rp. 9.282.208.785.-

Berdasar data diatas, tingkat pendapatan Kabupaten Ngawi dalam tiga tahun 2014-2016 maka anggaran tersebut masih dikategorikan perlu ditingkatkan, karena pendapatan hanya berkisar antara 3,78 % sampai 13,56 %. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Daerah Kabupaten Ngawi berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi serta bantuan dari pihak-pihak lain. Harapan terdapat pertumbuhan tingkat pendapatan keuangan daerah Kabupaten Ngawi yang signifikan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk tahun 2015 dan seterusnya. Dapat disimpulkan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Ngawi masih sangat bergantung pada pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

3.3.Efektivitas PAD

Berdasar hasil kajian statistik ketiga tahun anggaran (2014-2016) pada table IV. 13 diperoleh efektivitas Pendapatan Asli Daerah bahwa :

- 1) Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2014 mencapai 137,90 %. Hal ini menjadi mungkin, karena dengan adanya otonomi daerah, dimana daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi daerahnya dan Kabupaten Ngawi membuktikan hal ini.

- 2) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun selanjutnya yakni tahun anggaran 2015 hanya sebesar 121,18 %. Peningkatan 1,23 % ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ngawi mampu memanfaatkan peluang terhadap potensi-potensi daerah yang potensial yang nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Anggaran selanjutnya, yakni tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi meningkat 107,62 % dari tahun anggaran sebelumnya menjadi 121,18 %. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah banyak dipengaruhi meningkatnya realisasi pendapatan lain-lain yang sah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pembangunan daerah selama tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2016 di Kabupaten Ngawi, ditandai dengan tingkat pendapatan Kabupaten Ngawi selama periode tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2016 masih rendah, dengan rata-rata tingkat pendapatan sebesar 7,61 % dan mengalami pertumbuhan lambat sebesar 0,13 %. Dapat disimpulkan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Ngawi masih sangat bergantung pada pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
- 2) Rasio efektivitas, ditunjukan bahwa pada Tahun anggaran 2014 rasio efektivitas pada pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi mencapai 137,90% berarti kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah mencapai titik 137,90 % artinya sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Tahun anggaran 2015, rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah mencapai 121,18 % dari target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2016, rasio

efektivitas pada pemungutan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 107,62 %.

Rasioefisiensi Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten Ngawi ditunjukkan bahwa pada tahun 2014 rasio efisiensinya mencapai 1.180 % dan tahun 2015 rasio efisiensi sebesar 1.151 % sedangkan tahun anggaran 2016 sebesar 1.225 % atau. Hal ini memberi petunjuk bahwa rasio efisiensi ketiga tahun anggaran tersebut tidak melebihi batas dari rasio efisiensi yang ditoleransi. Disimpulkan bahwa pada tahun anggaran ini, berdasar rasio efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat dikatakan berhasil dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah karena tunggakan pada tahun ini adalah relatif terkecil jika dibandingkan dengan tunggakan pada tahun anggaran lain.

4.2. Saran-saran

- 1) Perlu adanya standarisasi terhadap rasio efektivitas dari pemerintah Kabupaten Ngawi sehingga terdapat kesulitan dari peneliti untuk mengambil kesimpulan mengenai tingkat rasio efektivitas tertentu apakah sudah dikategorikan efektif.
- 2) Dalam melakukan penelitian, penulis tidak meneliti lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Penulis hanya menganalisis berdasarkan data yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*, Pusat Pengembangan Akuntansi FE-UGM, Yogyakarta.

Departemen Keuangan. 2001. *Mekanisme Perhitungan Dana Alokasi Umum*, dikeluarkan oleh Sekretariat Badan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Badan Analisa Keuangan dan Moneter.

Devas, Nick. 1989. *Financing Local Government in Indonesia*, Center for International Studies Ohio University, Ohio.

Joko Widodo, 2001. *Akuntansi Sektor Publik*, Pusat Pengembangan Akuntansi YKPN, Yogyakarta.

- Kuncoro, 1995, *Kajian terhadap Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Tesis, (tidak dipublikasikan), Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo dan Kirana Jaya, Wihana. 1999, *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*, Yogyakarta: KOMPAK STIE YO.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Pakpahan, A. T. 1997. *Aspek Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Global.
- Akuntansi dan Keuangan. Vol 1 No. 2 September.